

PERAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KENOTARIATAN

Oleh
Rosyana Amilia Siregar¹, Supriyadi²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan notaris melakukan tindak pidana di bidang kenotariatan, serta mengetahui bagaimana upaya yang ditempuh oleh Majelis Pengawas Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pencegahan notaris agar tidak melakukan tindak pidana di bidang kenotariatan.

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif empiris, yaitu penelitian dengan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Pendekatan hukum normatif dengan mengutamakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini juga dilengkapi dengan data primer yang dipergunakan untuk mempertajam analisis. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen yang kemudian dilengkapi dengan data primer dengan cara komunikasi langsung (wawancara) narasumber dan responden. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan notaris melakukan tindak pidana di bidang kenotariatan yaitu ketidak profesionalan dalam menjalankan tugas jabatannya, tidak mengetahui tentang peraturan yang terbaru, kurangnya keimanan pada diri notaris, secara sadar berani melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Kode Etik karena alasan uang, karakter yang tidak baik pada diri notaris, kurang pemahannya notaris mengenai hal-hal yang menyangkut tugas jabatannya terkait dengan terhadap Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia, kurangnya kehati-hatian dalam diri notaris. Hasil penelitian ini juga menunjukkan upaya yang bisa dilakukan MPW DIY dalam pencegahan notaris agar tidak melakukan tindak pidana di bidang kenotariatan yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap MPD di wilayah DIY . Upaya preventif yang dapat dilakukan langsung oleh MPW untuk notaris yaitu pada saat pengucapan sumpah atau janji notaris, Ketua MPW DIY pada saat pidato memberikan nasehat atau wejangan agar notaris berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya dan selalu taat pada peraturan yang berlaku.

Kata kunci : *Notaris, Tindak Pidana Kenotariatan, MPW DIY*

¹ Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

² Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

THE ROLE OF SUPERVISORY COUNCIL OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA PROVINCE IN THE CRIME PREVENTION IN THE FIELD OF NOTARY

By

Rosyana Amilia Siregar³, Supriyadi⁴

Abstract

This research is aimed to know the factors that can cause notary do the crime in the notary, also to know how the effort can be made by Supervisory Council of The Special Region of Yogyakarta Province in The Crime Prevention in The Field of Notary.

This research is conducted through normative empiric approach, that is the combination between normative law approach and the additional empiric elements. The normative law approach with emphasis on secondary data which consists of primary, secondary and tertiary of legal materials. This research also be equipped with primary data that is used to sharpen the analysis. The secondary data is collected by study documents and then equipped with primary data by directly communicate with the informants and respondent. Then the data obtained is analyzed qualitatively.

This research showed that the efforts can be done by MPW of the special region of Yogyakarta Province (DIY) in preventing the notary to not doing crime in the field of notary is by monitoring and evaluating toward MPD in DIY with the agenda to provide coaching and guidance on the performance conducted by MPD. The efforts by MPW in preventing for notary is given to advice that be careful on the performance notary's jobdesk.

Key Word : *Notary, Notary's Crime, MPW DIY*

³ Banjarsari District, Surakarta, Central Java.

⁴ Faculty of Law, Gadjah Mada University.